



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
KE PROVINSI MALUKU
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2011-2012**

*

**

**

*

JAKARTA 2012



L A P O R A N
HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR-RI
KE PROVINSI MALUKU
RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2011-2012
TANGGAL 13 S.D. 15 APRIL 2012

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata tertib.
2. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 11 Januari 2012;
3. Rapat koordinasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Komisi I s.d Komisi XI tanggal 14 Maret 2012.
4. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 29 Maret 2011;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan kunjungan lapangan ini adalah sebagai berikut :

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait lainnya serta *stake holder* terkait dengan realisasi dan pelaksanaan pembangunan sektor bidang Komisi IV DPR RI di Provinsi Maluku, serta dukungan dan sinkronisasinya dengan program - program pembangunan Pemerintah Daerah.
2. Berdialog langsung dengan masyarakat dan melihat langsung di lapangan realisasi dan pelaksanaan pembangunan bidang Komisi IV DPR RI di Provinsi Maluku.
3. Mendapatkan informasi langsung tentang kendala dan permasalahan yang dihadapi terkait dengan aspek legislasi (peraturan perundang-undangan), anggaran dan pelaksanaan program-program pemerintah bidang Komisi IV DPR RI dan alternatif pemecahan masalahnya.
4. Menyerap aspirasi daerah dalam rangka meningkatkan program-program pemerintah terkait bidang Komisi IV DPR RI pada tahun-tahun mendatang.

C. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

NO	NAMA ANGGOTA	FRAKSI
1	H.M. ROMAHURMUZIY, ST., MT.	KETUA TIM/F-PPP
2	IR. H.M. ALI YACOB	ANGGOTA/F-PD
3	DRS. H. YUSRAN ASPAR, MSI	ANGGOTA/F-PD
4	DR. IR. MOCHAMMAD JAFAR HAFSAH	ANGGOTA/F-PD
5	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, SH	ANGGOTA/F-PG
6	HONING SANNY	ANGGOTA/F-PDI-P
7	IR. Hb. NABIEL AL MUSAWWA, M.Si.	ANGGOTA/F-PKS
8	H. HENDRA S. SINGKARU, SE.	ANGGOTA/F-PAN
9	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si	ANGGOTA/F-PPP
10	HJ. MIRATY DEWANINGSIH T., ST.	ANGGOTA/F-PPP
11	H. BUDI HERYADI, SE., MM.	ANGGOTA/F-GERINDRA

D. WAKTU DAN TEMPAT

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI ke Provinsi Maluku dilaksanakan pada hari Jumat - Minggu, tanggal 13 - 15 April 2012.

E. ACARA SELAMA KUNJUNGAN

Acara dan lokasi yang dikunjungi dalam kunjungan kerja Tim Anggota Komisi IV DPR RI di Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

1. Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Maluku beserta jajarannya, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku, dan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku;
2. Peninjauan Gudang BULOG di Kota Ambon serta berdialog dengan Kadivreg Bulog Ambon;
3. Peninjauan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I di Kota Ambon serta berdialog dengan kepala Badan Karantina Pertanian;
4. Peninjauan ke Balai Benih Hortikultura Telaga Kodok Provinsi Maluku;
5. Peninjauan ke Balai Budidaya Laut – Ambon;
6. Peninjauan ke Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru – Ambon;
7. Peninjauan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara – Ambon;
8. Peninjauan ke kelompok penerima program Kebun Bibit Rakyat (KBR) Kementerian Kehutanan di Dusun Seri Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.

F. GAMBARAN UMUM

1. **Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Maluku beserta jajarannya, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku, dan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku,** beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut:

Pada tahun 1999, Provinsi Maluku telah dimekarkan menjadi Maluku dan Maluku Utara berdasarkan UU No. 46 Tahun 1999. Provinsi Maluku sendiri mempunyai luas wilayah 712.480 kilometer persegi yang sebagian besar didominasi wilayah laut (92,4%), sementara wilayah daratan hanya menempati 7,6 persen saja. Dari segi wilayah administrasi pemerintahan, dewasa ini Provinsi Maluku memiliki 2 Pemda Kota, 9 Pemda Kabupaten, yang terbagi atas 73 Kecamatan, 863 Desa dan 34 Kelurahan.

APBD Maluku pada Tahun 2012 sebesar Rp.1,4 triliun; terdiri dari DAU Rp.829,4 miliar, DAK Rp. 38,06 miliar, Dana Bagi Hasil Rp.82.48 miliar, PAD Rp. 243,56 miliar, serta lain-lain pendapatan yang sah Rp. 218,58 miliar. Sementara itu APBN Provinsi Maluku tahun 2012 adalah sebesar Rp.11,1 triliun meliputi Belanja Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga sebesar Rp. 4,68 triliun dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp. 6,42 triliun.

Sebagai provinsi yang wilayahnya didominasi oleh wilayah laut, terdapat empat masalah utama yang dihadapi oleh Maluku di sektor Kelautan dan Perikanan:

1. Persoalan Dana Bagi Hasil sumberdaya perikanan yang dianggap merugikan karena dalam UU No. 33 tahun 2004 diatur bahwa proporsi bagi hasil 20% untuk Pemerintah pusat dan 80% dibagi rata ke seluruh kabupaten/kota.
2. Kebijakan Nasional Pemerintah pusat menetapkan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, namun agenda penerapan kebijakan tersebut belum terealisasi.
3. Provinsi Maluku mempunyai 12 pelabuhan perikanan, 5 diantaranya telah beroperasi, 3 pelabuhan telah selesai dibangun dan sisanya masih dalam proses pembangunan. Dukungan Komisi IV DPR RI sangat diperlukan untuk membantu penuntasan pembiayaan APBN.
4. Provinsi Maluku merasa dirugikan atas kewenangan provinsi memberi izin kapal ikan 30-60 GT dan kewenangan izin untuk >60 GT berada di pusat, karena kapal-kapal yang beroperasi di Wilayah Maluku berkapasitas lebih dari 60 GT. Dukungan Komisi IV DPR RI sangat diperlukan untuk meninjau ulang regulasi agar tidak merugikan daerah-daerah potensi sumberdaya perikanan.

Di sektor pertanian, Provinsi Maluku telah dipersiapkan menjadi salah satu daerah swasembada beras pada tahun 2014, namun terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Infrastruktur jaringan irigasi dan bendung kurang optimal, dimana 30% nya mengalami kerusakan dan perlu segera diperbaiki.
2. Luas lahan garapan petani berkisar antara 2-5 hektar sering terkendala minimnya ketersediaan tenaga kerja, sehingga diperlukan alat dan mesin pertanian untuk menunjang produktivitas.
3. Adanya plasma nutfah kerbau Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya yang belum dimanfaatkan secara optimal, namun sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka mendukung program Swasembada Daging nasional 2014.
4. Di bidang pangan, total kebutuhan beras Provinsi Maluku mencapai 125.000 ton per tahun. Dari jumlah tersebut yang dipenuhi dari hasil lokal hanya sekitar 52.000 ton (41,6%), sedangkan 73.000 ton (58,4%) dipasok dari luar. Kendala yang dihadapi oleh minimnya lahan yang digunakan untuk pertanian padi.

Di sektor kehutanan, Pemda Provinsi Maluku menyampaikan beberapa hal penting, yaitu:

1. Mengharapkan agar pembahasan substansi kehutanan untuk mendukung RTRWP Maluku dapat segera direalisasikan, sehingga tersedia ruang yang cukup bagi usaha pemberian layanan kepada masyarakat dan kepentingan pembangunan lainnya.
2. Luas lahan kritis di Maluku mencapai 796.891 Ha, sedangkan kemampuan Pemda untuk merehabilitasi hutan hanya seluas 5.500, sehingga lahan-lahan kritis belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Aspirasi yang disampaikan

1. Dukungan Komisi IV DPR RI untuk mendorong agenda pembahasan Rencana Undang-Undang tentang Daerah kepulauan untuk mendapatkan kekuatan hukum yang jelas dan pasti.
2. Dukungan Komisi IV DPR RI untuk mendorong pemerintah agar merealisasikan rencana kebijakan nasional yang menetapkan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.
3. Dukungan untuk pengembangan: (1) sektor pariwisata dengan komoditas unggulan: wisata bahari, sejarah dan budaya; (2) sektor kelautan dan perikanan: budidaya rumput laut, mutiara, kerapu dan perikanan tangkap; (3) sektor perkebunan: pala, kelapa, cengkeh.
4. Dukungan percepatan pembangunan infrastruktur berupa jaringan jalan, penyeberangan, moda transportasi laut dan udara.
5. Lima buah proposal usulan pengembangan pertanian di Provinsi Maluku untuk disampaikan kepada Kementerian Pertanian RI.

2. Peninjauan Gudang BULOG di Kota Ambon serta berdialog dengan Kadivreg Bulog Ambon, beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut:

Untuk mendukung kegiatan pelayanan publik, Perum Bulog Divre Maluku melaporkan stock beras yang dimiliki sebanyak 12.439.328 kg atau sekitar 50% dari kapasitas tampung gudang Bulog sebesar 24.500.000 Kg yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

Upaya yang dilakukan Bulog Divre Maluku dalam upaya pengendalian terhadap kenaikan harga konsumen masih mengandalkan Operasi Pasar Beras menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dimana realisasinya sampai 31 Maret 2012 sebanyak 4.800.029 kg. Beras operasi pasar Perum Bulog dijalankan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Gubernur Maluku sebesar Rp.6.500,-/Kg. Sementara itu penggunaan CBP untuk bantuan sosial per 31 Maret 2012 telah didistribusikan sebanyak 499.985 Kg, dan untuk TNI dan golongan anggaran lainnya sebesar 935.272 Kg.

Realisasi distribusi Raskin di Provinsi Maluku oleh Pemerintah per 31 Maret 2012 adalah sebanyak 8.010.990 Kg atau mencapai 92,50% dari Pagu Raskin s/d. April 2012. Permasalahan penyaluran Raskin yang disampaikan pada saat kunjungan kerja adalah:

1. Belum mencukupinya produksi padi di Provinsi Maluku untuk memenuhi kebutuhan lokal, sehingga beras harus didatangkan dari luar Provinsi
2. Kebijakan pemerintah lokal: Raskin diterimakan secara bergilir kepada Rumah Tangga Sasaran. Menurut perwakilan penerima Raskin, pada saat kunjungan (13 April 2012), Raskin sudah diterimakan dengan interval 2 bulan atau 3 bulan sekali.
3. Pada Tahun 2011 terdapat pengurangan penerima sebanyak 63 KK, sedangkan pada tahun 2012 ini pengurangan penerima mencapai 103 KK.

Untuk memenuhi kebutuhan produksi beras di Provinsi Maluku, perlu dilakukan penambahan atau perluasan lahan atau sawah baru di Maluku Tengah. Aspirasi ini senada dengan aspirasi dari Dinas Pertanian yang disampaikan melalui Gubernur Provinsi Maluku. Komisi IV DPR RI akan menyampaikan usulan aspirasi ini kepada Kementerian Pertanian untuk proses tindak lanjut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Peninjauan Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas I di Kota Ambon serta berdialog dengan kepala Badan Karantina Pertanian; beberapa hal penting yang disampaikan antara lain:

SKP Ambon merupakan Unit Pelaksana Teknis yang bernaung dibawah Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, memiliki tugas pokok Melaksanakan Kegiatan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati di beberapa wilayah kerja di Provinsi Maluku, antara lain: Bandara Pattimura, Pelabuhan Laut Yos

Sudarso, Pelabuhan Laut Tual (Kep. Kei), Pelabuhan Laut Namlea, Kantor Pos Ambon dan Pelabuhan Laut Kobisadar (P.Seram).

Selain melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya, SKP Ambon juga melakukan kegiatan peningkatan *Public Awareness* dengan cara: (1) sosialisasi melalui media Koran, RRI, TV lokal/nasional, web SKP dan Barantan, (2) Sosialisasi melalui pertemuan dg pihak kampus, SPP Pertanian, instansi terkait, pengguna jasa wilayah Pesisir, dan (3) Bulan Bakti Karantina (Penyebaran leaflet, brosur, kaos, kalender). Saat ini Barantan sedang menyusun sistem online untuk mempermudah akses informasi masyarakat terhadap proses karantina.

Komisi IV DPR RI mengapresiasi upaya peningkatan public awareness ini karena akan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam mendaftarkan komoditas perdagangannya dengan sistem Online, namun Komisi IV berpandangan bahwa sosialisasi secara manual juga harus lebih ditingkatkan karena tidak semua lapisan masyarakat dapat mengakses sistem online di internet. Dalam kesempatan ini Komisi IV DPR RI juga memandang perlunya penyatuan Badan Karantina di lingkup pertanian dan Perikanan.

4. Peninjauan ke Balai Benih Induk Hortikultura (BBIH) Telaga Kodok Provinsi Maluku; beberapa hal penting yang disampaikan antara lain:

Balai Benih Induk Hortikultura (BBIH) Telaga Kodok merupakan Unit Pelaksana Daerah dibawah Dinas Pertanian Provinsi Maluku yang dibiayai oleh APBD. Tugas pokok BBIH Maluku adalah untuk melestarikan plasma nutfah, mengembangkan dan menyediakan benih bermutu berbagai macam tanaman buah-buahan, sayuran dan tanaman hias. Beberapa jenis buah lokal unggulan yang dikembangkan adalah mangga, durian, jeruk manis kisar, salak soya, salak riring (endemik) pisang tangkalangit, dan rambutan. Saat ini BBIH telah membagikan 100.000 anakan kepada masyarakat agar ditanam di pekarangan rumah, sebagai bagian dari program penyediaan 1 juta pohon di Provinsi Maluku. Total area yang ditempati oleh BBIH adalah 20 hektar.

Kedepannya, BBIH ingin mengembangkan diri sebagai lokasi agrowisata serta menjadi tempat pendidikan dan pelatihan budidaya hortikultura. Namun kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran, sebab biaya untuk pengembangan di BBIH hanya 200 juta rupiah setahun. Kepada Tim Kunjungan Kerja, Kepala BBIH menyampaikan bahwa luasnya lahan yang dimiliki tidak seimbang dengan minimnya anggaran dan jumlah SDM yang mengelola, aspirasi yang disampaikan adalah memohon agar Komisi IV membantu menyampaikan kepada Kementerian Pertanian agar mengalokasikan 1 unit traktor roda empat yang sangat diperlukan untuk mengelola lahan. Komisi IV DPR RI telah meminta kepada Direktur Bidang Alat dan Industri Pertanian yang ikut serta dalam kunjungan tersebut agar dapat mengalokasikan bantuan 1 unit traktor kepada BBIH Provinsi Maluku.

5. Peninjauan ke Balai Budidaya Laut (BBL) – Ambon; beberapa hal penting yang disampaikan antara lain:

BBL Ambon merupakan salah satu UPT Pusat Ditjen Perikanan Budidaya KKP yang bertugas untuk melaksanakan teknik perbenihan dan pembudidayaan ikan laut serta pelestarian sumber daya induk/benih dan lingkungan. Wilayah kerja BBL Ambon meliputi Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

Kegiatan yang dilakukan di BBL Ambon saat ini antara lain: (1) pembenihan beberapa jenis ikan laut yaitu ikan kerapu bebek, ikan kerapu sunu, ikan bubara, produksi massal plankton untuk pakan alami dan penyediaan stock bibit plankton murni; (2) Pembesaran ikan kerapu bebek, kerapu macan dan Ikan Bubara; (3) Hatchery (pembibitan) mutiara dan rumput laut; (4) Pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan; serta pembenihan dan domestik beberapa jenis ikan hias ekonomis penting seperti Ikan Banggai *Cardinal Fish*, *Angel Fish*, Ikan *Blue Devil*, Ikan Nemo (*Clown Fish*), dan *Mandarin Fish*.

Permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan sarana berupa bak pembesaran. BBL Ambon berharap agar Komisi IV DPR RI memberikan dorongan anggaran KKP untuk pembangunan backyard pembesaran kerapu. Komisi IV DPR RI meminta kepada KKP untuk memperhatikan usulan dari BBL Ambon tersebut dan menindaklanjutinya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Peninjauan ke Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru – Ambon; beberapa hal penting yang disampaikan antara lain:

Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru – Ambon merupakan unit pemerintah dibawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan. SUPM Ambon memiliki 4 jurusan: nautika perikanan laut, teknika perikanan laut, teknologi pengolahan hasil perikanan dan teknologi budidaya perikanan. Saat ini SUPM Ambon memiliki 354 orang siswa, dimana 64 orang diantaranya merupakan anak-anak pelaku utama perikanan yang berasal dari daerah pesisir yang ada di Provinsi Maluku. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Komisi IV DPR RI mengapresiasi SUPM Ambon dalam mendidik calon SDM kelautan dan Perikanan berkualitas, serta berharap agar SUPM Ambon dapat meningkatkan jumlah siswa yang berasal dari nelayan dan pelaku perikanan utama, terutama yang berasal dari kalangan keluarga yang kurang mampu.

7. Peninjauan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara – Ambon; beberapa hal penting yang disampaikan antara lain:

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon dibangun pada tahun 1984-1985 dengan sumber dana APBN, APBD dan LOAN ADB INP-22 dengan kelas Pangkalan Pendarata Ikan / PPI (Pelabuhan Type D), yang selanjutnya pada tahun 2000 ditingkatkan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (Pelabuhan Type B). Areal yang ditempati seluas \pm 6 Ha yang terdiri atas daratan seluas 3,5 Ha dan luas perairan seluas 2,5 Ha. Sekitar 75 persen area daratan dimanfaatkan untuk kawasan industri. Disamping fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang, beberapa fasilitas penunjang industri yang dimiliki antara lain: reefer container, cold storage, guest house dan ruang serba guna yang dapat disewakan. Pada tahun 2010 dilaporkan bahwa sumbangsih PPN Ambon terhadap PNBPN mencapai Rp. 518.130.792,- sementara itu peredaran uang di PPN Ambon pada kurun waktu yang sama mencapai 1,14 triliun rupiah.

Permasalahan yang dihadapi oleh PPN Ambon adalah dalam pengembangan pelabuhan, masih terdapat sekitar 125 rumah masih belum dibebaskan. Perlu dukungan APBN dan APBD yang memadai dalam menuntaskan masalah pembebasan lahan dalam pengembangan PPN Ambon.

8. Peninjauan ke kelompok penerima program Kebun Bibit Rakyat (KBR) Kementerian Kehutanan di Dusun Seri Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon; beberapa hal penting yang disampaikan antara lain:

Kunjungan ke penerima program Kebun Bibit Rakyat (KBR) dilaksanakan di persemaian kelompok KBR Kezia di Dusun Seri Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Kelompok ini menerima program KBR pada tahun 2010 dengan jumlah dana yang diterima sebesar Rp. 67.460.000,- Dana tersebut digunakan untuk pembibitan 50.000 batang/pohon kayu-kayuan dan *multi purposae trees seed* (MPTS) atau tanaman buah-buahan seperti Kaliandra, Kenari, Lenggua, Durian dan Asam Jawa. Persemaian dilakukan diatas lahan seluas 0,25 ha, sedangkan untuk penanaman bibit dilakukan di lahan sekitar Gunung Nona yang berada di sekitar daerah persemaian yang didistribusikan melalui masing-masing anggota kelompok.

Komisi IV DPR RI mengapresiasi upaya kelompok penerima KBR dan berharap agar program ini dapat terus bergulir dan memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan hidup khususnya bagi anggota kelompok dan bagi masyarakat sekitar.

G. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam upaya pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan di provinsi Maluku, terutama antusiasme Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Mitra Kerja untuk memperhatikan dan menindaklanjuti hasil kunjungan kerja di Provinsi Maluku
2. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperhatikan aspirasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku menuangkan kebijakan yang konkret dalam upaya melaksanakan penancangan program Provinsi Maluku sebagai lumbung ikan nasional.
3. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian untuk mengalokasikan bantuan 1 unit traktor roda 4 untuk Balai Benih Induk Hortikultura Provinsi Maluku, serta memperhatikan aspirasi dan proposal yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
4. Komisi IV DPR RI mempunyai gagasan untuk menyatukan badan-badan karantina yang sifatnya sektoral menjadi satu badan karantina, serta mempertimbangkan untuk mengkaji ulang peraturan perundang-undangan terkait perkarantinaan.

H. PENUTUP

Terhadap beberapa aspirasi dari mitra kerja/pemerintah daerah dan tanggapan dari Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI, Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Maluku akan menindaklanjuti dengan menyampaikan baik pada saat rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI. Beberapa program pembangunan yang diusulkan langsung dan atau tertulis oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah selama kunjungan kerja ini agar dapat ditindak lanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait khususnya dalam APBN Tahun 2012 - 2013.

Jakarta, 30 April 2012

KOMISI IV DPR RI
KETUA TIM,

H.M. ROMAHRMUZIY, ST. MT.

A-304